



Haryadi Keluarkan Perwal

Masih Berseteru, DPRD Belum Bahas APBD-P

YOGYA, TRIBUN - Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, memastikan akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait penganggaran sejumlah kegiatan. Di antara yang cukup krusial adalah untuk pembayaran honor ribuan tenaga bantuan di lingkungan Pemkot, honor tambahan bagi guru tidak tetap, serta honor tenaga kontrak di Terminal Giwangan.

Perwal akhirnya akan dikeluarkan karena penganggaran melalui APBD Perubahan 2014 dinilai tidak lagi bisa diharapkan. Pasalnya, anggaran perubahan tersebut hingga saat ini atau dua bulan menjelang akhir tahun anggaran, belum dibahas di DPRD Kota Yogyakarta.

Padahal, semula honor tenaga teknis non PNS sangat bergantung pada pembahasan anggaran perubahan tersebut. Honor mereka

Sebelumnya, pemkot akan melakukan konsultasi ke Pemda DIY. "Bulan ini, Oktober sudah saya teken dan keluarkan"

HARYADI SUYUTI
Wali Kota Yogyakarta

hanya dianggarkan hingga Oktober 2014. Dua bulan sisanya, menunggu kepastian penganggaran di perubahan. Mengingat APBD-P 2014 hingga saat ini belum dibahas, wali kota pun segera menyiapkan perwal sebagai penggantinya.

Haryadi mengatakan, penerbitan perwal diperkirakan pada pekan ini. Sebelumnya, pemkot akan melakukan konsultasi ke Pemda DIY. "Bulan ini, Oktober sudah saya teken dan keluarkan," kata Haryadi, Senin (27/10).

Informasi dari Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPPDK) Kota Yogyakarta, penganggaran juga tidak tepat waktu.

Kepala DPPDK Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, menambahkan, beberapa kegiatan diatur dengan perwal antara lain, honorarium tenaga bantuan di pemkot, tambahan honor guru tidak tetap, dan tenaga kontrak di Terminal Giwangan. Selain itu, juga untuk Jamkesda dan biaya listrik, menyesuaikan hasil konsultasi ke pemda DIY nanti.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari Fraksi PAN, M Ali Fahmi, juga mengaku bahwa komunikasi politik di internal dewan berkaitan dengan penentuan pimpinan alat kelengkapan sudah tidak ada titik temu. Hal itu mengakibatkan pembahasan anggaran perubahan tidak berjalan. Dia dan fraksi-fraksi lain di dewan mendo-

bulan dilantik sebagai wakil rakyat ternyata tak menentu.

Masih Berseteru

Kondisi komunikasi politik antara fraksi-fraksi Koalisi Merah Putih dan PDIP berjalan alot. Hal itu berpengaruh pada nasib sejumlah pembahasan penting. Sampai saat ini, mereka bahkan belum melakukan pembahasan perihal penting seperti anggaran perubahan, tetapi masih berkuat pada penentuan pimpinan alat kelengkapan.

Meski demikian, Haryadi menampik langkahnya untuk menerbitkan perwal berarti meninggalkan dewan sebagai bagian dari pemerintahan. Menurutnya, penganggaran harus tetap dilakukan meski dengan perwal.

Penerbitan Perwal ini pun bukan kali pertama. Pada 2013, Pemkot juga melakukan hal serupa. Saat itu pembahasan APBD 2014

untuk pembiayaan honor tenaga non PNS setidaknya mencapai Rp9 miliar.

Haryadi menjelaskan, kegiatan belanja yang dapat diatur dalam perwal memang sebatas belanja wajib serta kegiatan teknis lainnya sebagaimana dalam APBD Perubahan harus ditunda atau ditangguhkan hingga 2015.

Keputusan wali kota mengeluarkan perwal itu memang tidak tiba-tiba. Beberapa kali pertimbangan ditulur karena eksekutif masih berharap ada pembahasan anggaran perubahan di legislatif. Namun, dinamika internal dewan sejak dua

Instansi	Tindak Lanjut
1. DPPDK	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.	<input checked="" type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.	
5.	

✓ Netral
✓ Segera

Sifat: Segera

Yogyakarta,
Kepala
Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005